

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 bersifat fluktuatif, tahun 2013 hingga tahun 2014 menunjukkan hasil yang sangat efektif dengan persentase melebihi 100%. Efektivitas terendah terjadi pada tahun 2015 dengan kriteria efektif. Namun pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya kembali berada pada katagori sangat efektif dengan persentase melebihi 100%. Namun, rata-rata efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada pemerintah daerah Kota Bandung untuk tahun 2013 hingga tahun 2016 sudah berada pada katagori sangat efektif. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja BPPD dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sebelumnya sudah baik.
2. Tingkat kontribusi PBB-P2 tahun 2013 sampai dengan 2016 bersifat fluktuatif, tahun 2013 hingga tahun 2015 persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD terus meningkat dari yang semula berada pada katagori kurang di tahun 2013 kemudian berubah menjadi sedang di tahun 2014 dan tahun 2015. Kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2015 dengan persentase 21,50%, dan persentase

terendah yaitu pada tahun 2016 yang kembali pada katagori kurang. Hal ini membuktikan bahwa sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 masih belum memuaskan. Walaupun secara keseluruhan jumlah pendapatan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan PBB-P2 saja, karena masih terdapat jumlah penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan dalam satu daerah, yaitu hanya pada Kota Bandung saja.
2. Rentang waktu yang dipilih kurang panjang, yaitu hanya empat tahun terakhir.
3. Terdapat perbedaan data penerimaan PBB-P2 antara data yang diperoleh peneliti dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dengan data PBB-P2 yang ada dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang diterbitkan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lokasi penelitian tidak hanya pada Kota Bandung misalnya seperti Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan lainnya sehingga nantinya dapat dibandingkan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Provinsi Jawa Barat.
- b. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan rentang waktu yang diteliti, semakin panjang rentang waktu yang diteliti, maka akan semakin akurat.
- c. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel-variabel yang akan diteliti misalnya mengenai potensi atau efisiensi penerimaan PBB-P2. Selain itu, dapat menambahkan jenis pajak daerah yang dapat diteliti sehingga dapat dibandingkan kontribusi PBB-P2 dengan sektor pajak daerah lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah Kota Bandung, atau dalam penelitian ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dapat dilakukan beberapa hal yaitu:

- a. Mempertahankan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan bahkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan yang didapatkan untuk setiap tahunnya dengan adanya aplikasi yang khusus melayani masyarakat mengenai segala hal yang berhubungan dengan PBB-P2 dan adanya bis yang beroperasi langsung ke daerah-daerah kecil yang dapat membantu masyarakat.

- b. Untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan beberapa perbaikan yang dapat mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 seperti menambah jumlah bis yang beroperasi langsung ke daerah-daerah kecil yang dapat membantu masyarakat.
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan aplikasi yang dibuat pemerintah supaya lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dari setiap golongan. Selain itu, pemerintah dapat menambah jumlah bis yang beroperasi langsung ke setiap daerah-daerah kecil sehingga masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung, dan diharapkan bis tersebut nantinya tidak hanya sebagai tempat pemberian informasi bagi masyarakat mengenai PBB-P2 tapi juga dapat dijadikan tempat pembayaran pajak secara langsung bagi masyarakat yang tempat tinggalnya masih jauh dengan tempat pembayaran pajak.